

USAHA DI LUAR KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI DESA PANTAI : PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGANNYA¹⁾

Oleh :
Erizal J.²⁾

Abstrak

Tidak meratanya distribusi nelayan di beberapa desa pantai, menyebabkan tingkat pengusahaan perairan juga berbeda. Perairan di sekitar Selat Malaka dan Pantai Utara Jawa disinyalir telah mengalami kelebihan tangkap. Pada kondisi ini kehidupan nelayan sering semakin sulit, karena semakin terbatasnya hasil tangkapan. Akibatnya kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari semakin rendah, apalagi kegiatan penangkapan ikan ini terkait dengan musim serta fluktuatifnya harga ikan. Dengan kondisi seperti ini sulit diharapkan terjadinya akumulasi modal yang memungkinkan nelayan mengembangkan berbagai jenis usaha lainnya. Sehingga upaya nelayan untuk keluar dari kegiatan penangkapan, sering terbentur pada masalah modal dan minimnya ketrampilan yang dipunyai nelayan di luar kegiatan penangkapan ikan, karena terbatasnya waktu mereka untuk "melihat" aktivitas di luar kegiatan penangkapan ikan. Selain itu beberapa karakteristik dari kehidupan nelayan menghambat upayanya untuk mengembangkan usaha di luar kegiatan penangkapan. Hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa secara potensial usaha di luar kegiatan penangkapan seperti budidaya pantai dan usaha lainnya, sangat memungkinkan untuk dilakukan nelayan, terutama aktivitas yang tidak menuntut skill dan modal yang besar, serta dapat dilaksanakan oleh istri nelayan dan anak-anaknya. Untuk itu diperlukan berbagai instrumen yang dapat menetralkan hambatan-hambatan yang ada dalam diri nelayan sendiri dan yang ada di luar dirinya.

PENDAHULUAN

Besarnya perhatian pemerintah dalam tahun-tahun terakhir ini terhadap masalah kemiskinan, merupakan momentum yang baik bagi upaya peningkatan pendapatan nelayan di desa-desa pantai. Karena secara umum kehidupan nelayan di desa pantai relatif masih jauh tertinggal dari masyarakat petani lainnya. Sehingga kalau berbicara tentang kemiskinan, maka akan terkait erat dengan kehidupan nelayan. Saat ini di Indonesia ada sekitar 1,5 juta nelayan yang tinggal di sepanjang 81.000 kilometer garis pantai, dan sekitar 60 persen dari rumah tangga nelayan berada di bawah garis kemiskinan (Susilowati, 1991).

Kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan usaha utama dari para nelayan. Aktifitas ini dilakukan secara turun-temurun, dan secara umum tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Terbatasnya alat tangkap dan perahu yang digunakan, sementara itu ketrampilan dalam mengelola usaha

juga minim, menyebabkan produktivitas penangkapan relatif tidak banyak mengalami peningkatan. Menurut Pasandaran *et al.* (1990), produktivitas per nelayan selama sepuluh tahun terakhir (1977 – 1987), berkisar 7 kilogram per hari.

Upaya pemerintah dalam mengangkat kehidupan nelayan, lebih banyak melalui penyediaan fasilitas untuk meningkatkan intensitas penangkapan dan memperluas daerah tangkapan nelayan, seperti kegiatan motorisasi perahu penangkapan dan pengadaan sarana penunjangnya. Kondisi beberapa perairan yang sudah kelebihan tangkap dan rendahnya kemampuan manajerial nelayan, pada beberapa kasus menyebabkan upaya tersebut belum sepenuhnya dapat membantu kehidupan nelayan,

¹⁾ Disampaikan pada Seminar Rutin Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, tanggal 17 Juli 1993.

²⁾ Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

terutama nelayan kecil. Kegiatan di luar penangkapan ikan dan usaha ikutannya, seperti budidaya pantai dan usaha lainnya, belum banyak mendapat perhatian. Kegiatan ini sangat potensial sebagai andalan usaha nelayan kecil untuk jangka panjang, terutama di wilayah yang perairannya sudah mengalami kelebihan tangkap.

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk melihat peluang usaha yang ada di desa pantai, terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha di luar kegiatan penangkapan ikan, beserta hambatan dalam pengembangannya. Uraian akan didahului dengan memberikan gambaran umum tentang desa pantai.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada perairan-perairan yang sudah kelebihan tangkap, ketiadaan kesempatan kerja di sektor-sektor lainnya menyebabkan usaha untuk memperbaiki keadaan nelayan kecil akan meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya perikanan yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut Panayotou (1987), kebijaksanaan untuk memperbaiki pendapatan nelayan kecil melalui subsidi masukan atau keluaran (termasuk meningkatkan teknologi mereka) akan mengundang pendatang-pendatang baru, sehingga kerusakan sumberdaya akan bertambah besar tanpa mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian untuk jangka panjang pemecahan masalah nelayan kecil haruslah dicari di luar sektor perikanan. Hanya jika biaya oportunitas nelayan kecil lebih tinggi dari pada yang mereka peroleh sekarang, usaha menaikkan pendapatan mereka akan berhasil dan pemasukan pendatang baru ke dalam kegiatan perikanan dapat dicegah sehingga sumber-sumber perikanan dapat dipulihkan. Berdasarkan pengalaman Thailand menanggulangi masalah ini, usaha meningkatkan biaya oportunitas nelayan kecil membutuhkan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar di luar sektor perikanan, untuk menyerap kelebihan tenaga kerja. Hal itu mungkin suatu proses yang sulit dan panjang namun sangat penting untuk dilaksanakan (Panayotou, 1987).

Secara lebih spesifik lagi Smith (1987) membuat pengelompokan terhadap pengaruh jangka panjang dari program-program pengembangan pada perikanan yang diusahakan secara berlebihan. Dari beberapa program yang diajukannya, hanya usaha berupa pengembangan sumber pendapatan alter-

natif atau tambahan yang meningkatkan hasil tangkapan lestari dan pendapatan perorangan nelayan. Keadaan ini merupakan alternatif yang ideal menurut Smith.

Makalah ini merupakan hasil studi pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang terkait dengan desa pantai dan beberapa pemikiran tentang pengembangan sub sektor perikanan. Selain itu keterlibatan penulis pada beberapa penelitian tentang desa pantai dan kemiskinan, memperkaya pemahaman penulis terhadap masalah ini.

KINERJA DESA PANTAI

Berbagai batasan diberikan orang tentang desa pantai, dan semuanya secara umum mengarah pada pengertian bahwa desa tersebut merupakan desa nelayan. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.1/1289 tanggal 30 Juli 1987 tentang: Penyempurnaan teknis cara perhitungan skor klasifikasi tingkat perkembangan desa (Anonim, 1990), desa pantai adalah:

"Desa yang memiliki pantai dan sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan".

Menurut Manurung *et al.* (1989) desa pantai adalah desa-desa yang berada di tepi pantai yang mempunyai ciri-ciri:

- (1) Mata pencaharian sebagian besar atau semua penduduk desa tersebut berasal dari sumberdaya perikanan laut, atau
- (2) Hanya sebagian kecil penduduk desa yang mempunyai mata pencaharian dari sumberdaya perikanan, tetapi sumberdaya perikanan merupakan potensi ekonomi terbesar di sana.

Bertolak dari batasan-batasan di atas dapat disarikan bahwa desa pantai itu adalah desa-desa yang terletak di tepi pantai dengan sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, dan kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan usaha utama penduduknya.

Kondisi Perairan

Tidak meratanya distribusi nelayan pada desa pantai yang ada, menyebabkan tingkat pengusahaan perairannya juga berbeda. Pada daerah-daerah tertentu, seperti pantai utara Jawa, tingkat pengusahaan pantainya sudah berlebih, sementara itu perairan lainnya ada yang masih sangat sedikit ting-

kat pengusahaannya. Nikijuluw (1984) mengelompokkan perairan yang ada di Indonesia dalam tiga kategori, yaitu perairan dengan tingkat pengusahaan berlebih, tinggi dan moderat.

Tingkat pengusahaan perairan yang berlebih berarti terjadi pengurangan stok ikan di perairan karena proses penangkapan dan hasil tangkapan per satuan upaya akan terus berkurang. Sementara itu perairan dengan tingkat pengusahaan tinggi berarti hasil tangkapan sudah sesuai dengan potensi yang ada, peningkatan jumlah upaya tidak akan menambah hasil tangkapan. Pada perairan yang moderat berarti hasil tangkapan merupakan bagian yang nyata dari potensi, dan penambahan upaya penangkapan masih rasional untuk dilakukan.

Berdasarkan pengelompokkan di atas, Nikijuluw (1984) mencoba memetakan perairan Indonesia dan hasilnya seperti terlihat pada Tabel 1. Perairan pantai utara Jawa sudah berada pada kondisi yang berlebih untuk ikan Demersal dan moderat untuk ikan Pelagis. Sementara itu perairan sekitar Selat Malaka sudah berada pada kondisi berlebih untuk ikan Demersal dan Pelagis, dan di Selat Bali dan NTT untuk ikan Pelagis sudah ber-

ada pada kondisi yang berlebih. Bila dibandingkan dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dwiponggo (1991), keadaannya tidak banyak berbeda. Pada perairan pantai utara Jawa dan Selatan Malaka, tingkat pengusahaannya adalah jauh di atas potensi produksi yang lestari.

Perairan lain keadaannya berada pada kondisi tinggi dan moderat, perairan sekitar Irian Jaya dan Maluku tingkat eksploitasinya paling rendah dibandingkan perairan lainnya, dan masih sangat terbuka untuk masuknya usaha eksploitasi, baik untuk ikan Pelagis dan Demersal. Beberapa perairan seperti Selatan Sulawesi, Barat Sumatera sudah berada pada ambang pengusahaan yang berlebih dan menurut Dwiponggo (1991), bila tidak dikelola dengan baik akan melewati batas potensi produksi yang lestari.

Secara umum pengusahaan perairan yang sudah berlebih dan tinggi lebih banyak dirasakan oleh nelayan kecil, terutama yang melakukan penangkapan ikan sekitar daerah pantai. Hasil penelitian Manurung *et al.* (1989), menunjukkan bahwa nelayan yang mengusahakan bagan, sekitar 65 persen dari seluruh responden menyatakan jumlah

Tabel 1. Kondisi beberapa perairan di Indonesia, tahun 1982 dan 1988, diperinci menurut lokasi perairan

No.	Perairan	Keadaan pengusahaan perairan tahun 1982 a)		Keadaan pengusahaan perairan tahun 1988 b)		(%)
		Ikan Demersal	Ikan Pelagis	Produksi (ton)	Potensi Produksi (ton)	
1.	Utara Jawa	Berlebih	Moderat	413.474	278.380	148,5
2.	Selat Malaka	Berlebih	Berlebih	350.822	266.529	131,6
3.	Selatan Sulawesi	Tinggi	t.a.d.	286.712	425.248	67,4
4.	Timur Sumatera	Moderat	t.a.d.	160.715	277.044	58,0
5.	Barat Sumatera	Tinggi	t.a.d.	146.188	211.947	69,0
6.	Selat Bali - NTT	t.a.d.	Berlebih (khusus selat Bali)	216.926	333.201	65,1
7.	Maluku	Moderat	Moderat	189.826*)	1 358.269*)	14,0
8.	Timur Kalimantan	t.a.d.	t.a.d.	100.419	264.911	37,9
9.	Selatan dan Barat Kalimantan	t.a.d.	t.a.d.	103.387	508.313	20,3
10.	Utara Sulawesi	t.a.d.	t.a.d.	112.998	300.505	37,6
11.	Selatan Jawa	Tinggi	Moderat	88.092	167.242	52,7
12.	Irian Jaya	Tinggi	Moderat	189.826*)	1 358.269*)	14,0

Sumber : a) Dwiponggo, 1982 dalam Nikijuluw (1984).

b) Dwiponggo (1991).

Keterangan : t.a.d. (tidak ada data)

*) Data untuk Maluku dan Irian Jaya disatukan

(%) Persentase jumlah produksi terhadap potensi produksi.

hasil tangkapannya berkurang. Sedangkan pada nelayan purse seine tidak ada yang menyatakan hasil tangkapannya berkurang.

Kondisi perairan yang tidak merata ini membuat upaya pengembangan perikanan rakyat nampaknya tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam, dan barangkali harus dilihat secara kasus per kasus. Di daerah yang sudah padat kegiatan penangkapannya, pengembangannya perlu menekankan pada upaya peningkatan nilai tambah hasil dan diversifikasi usaha. Sedangkan pada perairan yang kurang padat, program dapat difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu produksi.

Usaha Penangkapan Ikan

Usaha penangkapan ikan di laut sampai saat ini masih didominasi oleh usaha-usaha penangkapan skala kecil. Menurut Mintoro (1993), lebih kurang sembilan puluh persen nelayan Indonesia termasuk dalam kategori nelayan skala kecil dengan ciri-ciri antara lain, penggunaan perahu tanpa motor masih dominan, lama penangkapan umumnya satu hari, daerah penangkapan sekitar pantai, tingkat pendidikan sebagian besar masih rendah, lama penang-

kan dalam satu tahun sangat dipengaruhi musim ikan dan sangat tergantung pada pemilik modal.

Ciri-ciri yang melekat dengan usaha penangkapan skala kecil seperti diuraikan di atas, merupakan resultante dari berbagai sebab yang saling terkait satu dengan lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan lemahnya kemampuan manajerial, besarnya ketidakpastian hasil, harga ikan yang tidak stabil, kondisi perairan yang sudah lebih lengkap, terbatasnya peluang usaha lain yang bisa dimasuki dan kelembagaan pendukung yang belum solid, merupakan serangkaian penyebab yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pemecahan masalah nelayan skala kecil tidak dapat dilakukan secara parsial namun harus merupakan suatu upaya yang terpadu, untuk dapat menetralkan berbagai penyebab di atas.

Upaya pemerintah selama ini, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, lebih banyak mengarah kepada upaya memperluas daerah tangkap nelayan dengan memberikan kredit untuk motorisasi perahu dan perbaikan alat tangkap. Melalui upaya ini jumlah kapal motor dan perahu dengan motor tempel meningkat cukup pesat. Seperti terlihat pada Tabel 2, selama tahun 1983-1989 jumlah kapal motor meningkat dengan laju rata-rata 7,61 per tahun, se-

Tabel 2. Perkembangan jumlah perahu dan kapal tangkap ikan di Indonesia dari tahun 1983-1989 (unit)

Tahun	Perahu		Kapal motor	Total perahu dan kapal
	Tanpa motor	Motor tempel		
1983	220.706 (72)	57.490 (19)	28.861 (9)	307.057
1984	219.929 (70)	61.789 (20)	31.922 (10)	313.640
1985	220.823 (70)	61.867 (20)	33.756 (11)	316.446
1986	219.130 (69)	62.809 (20)	36.156 (11)	318.095
1987	222.233 (67)	70.380 (21)	41.459 (12)	334.072
1988	220.138 (66)	71.154 (21)	42.910 (13)	334.202
1989	218.553 (65)	71.122 (21)	45.413 (14)	335.088
Laju perkembangan (r/th)	-0.075	3,73	7,61	

Sumber : Statistik Indonesia 1986 s/d 1991, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

mentara itu perahu motor tempel meningkat juga dengan 3,73 persen per tahun.

Peningkatan yang cukup pesat pada perahu dengan motor tempel dan perahu motor ini tidak diimbangi oleh berkurangnya perahu tanpa motor dengan laju yang sama. Perahu tanpa motor hanya berkurang dengan laju 0,075 persen per tahun, sehingga relatif tetap jumlahnya. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa upaya motorisasi belum banyak merubah kondisi kehidupan nelayan kecil.

Hasil penelitian Mintoro (1993) pada pola "Small Scale Fisheries Development Project" (SSFDP) di Lombok, menunjukkan bahwa motorisasi menyebabkan terjadinya "over supply" ikan Cakalang di TPI dan jelas ini akan membawa dampak yang kurang baik terhadap harga ikan. Selain itu kegiatan proyek ini, kurang memahami hierarki dalam kegiatan penangkapan ikan, sehingga menyebabkan kelompok-kelompok yang dibentuk tidak stabil, dan ini jelas mengancam keberlanjutan program, karena paket ini diberikan pada kelompok.

Secara historis kegiatan motorisasi ini telah menciptakan berbagai kelas dalam masyarakat nelayan dan adanya kelas buruh (Pollnac, 1988). Selain itu stratifikasi sosial itu telah menciptakan suatu sistim pembagian hasil, yang sering menekan mereka yang berada pada posisi yang lemah. Pada saat kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan dengan peralatan-peralatan yang sederhana, hampir semua nelayan punya perahu dan alat tangkap sederhana serta hidup cukup makmur. Hal ini tercermin dari hasil penelitian Mubyarto *et al.* (1984) di desa Bulu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dari laporan penelitian ini tentang sejarah Ekonomi Desa tertulis:

"Pada akhir tahun 60-an sampai tahun awal 70-an bisa dikatakan merupakan tahun-tahun yang makmur bagi nelayan di desa ini Jumlah perahu kecil juga bertambah, mereka yang sebelumnya bekerja sebagai buruh atau nelayan kecil bisa mengumpulkan uang untuk membeli perahu jukung."

Dalam hal sistim bagi hasil penangkapan, posisi pendega dan buruh lainnya sering dalam kondisi tidak berdaya. Hasil penelitian Erwidodo *et al.* (1991) di Kabupaten Indramayu, menunjukkan bahwa buruh nelayan hanya mendapatkan hasil sekitar Rp 2000 per hari, jauh di bawah juragan laut ataupun juragan darat. Demikian juga hasil penelitian Arga dan M. Antara (1992), dimana disebut-

kan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok rumah tangga nelayan di Bali mengalami ketimpangan yang serius dengan gini rasio sebesar 0.51.

Uraian di atas bukan dimaksudkan penulis untuk menyatakan bahwa modernisasi pada usaha penangkapan ikan tidak baik untuk dilakukan. Tapi ingin ditekankan di sini bahwa modernisasi pada usaha penangkapan ikan perlu diimbangi upaya-upaya peningkatan "bargaining position" para nelayan dan buruh, sehingga mereka punya alternatif lain bila terpaksa tercecer dalam proses modernisasi itu sendiri. Upaya-upaya itu antara lain adalah mengembangkan usaha di luar kegiatan penangkapan ikan.

PELUANG USAHA DI LUAR KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Usaha di luar kegiatan penangkapan ikan yang dimaksud di sini adalah usaha yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penangkapan ikan. Sebenarnya beberapa kegiatan dalam pra penangkapan dan pasca penangkapan, yang terkait langsung dengan kegiatan penangkapan, merupakan usaha yang cukup potensial sebagai usaha tambahan bagi nelayan. Namun karena usaha ini bersifat musiman sebagaimana usaha penangkapan, maka sulit diandalkan untuk dapat menstabilkan pendapatan nelayan.

Kegiatan pengolahan ikan misalnya, pada hakekatnya mempunyai manfaat ganda, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan serta menstabilkan harga. Namun kegiatan pengolahan ini sangat terkait dengan ikan hasil tangkapan, sehingga kontinuitas usaha tidak terjamin (Simatupang *et al.*, 1990).

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha di luar kegiatan penangkapan ikan telah mulai dilakukan melalui beberapa program, seperti Program Pembinaan Peningkatan Petani Kecil (P4K) di beberapa desa pantai. Hasil penelitian Hermanto (1985) menunjukkan, bahwa program yang memberikan bantuan ternak besar ini pada nelayan, telah berhasil meningkatkan pendapatan nelayan. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan budidaya pantai terus juga dipacu pemerintah, dengan mengembangkan berbagai paket program.

Usaha Budidaya Pantai

Sekitar 400.000 hektar wilayah pantai laut Indonesia, potensial digunakan untuk budidaya laut. Potensi ini akan lebih besar lagi bila diperhitungkan pula luas rawa pantai yang luasnya 4,2 juta hektar. Menurut Cholik dan S. Putro (1990) diperkirakan sekitar 800.000 hektar dari areal rawa pantai tersebut layak secara teknis untuk pertambakan.

Selama ini kegiatan budidaya di wilayah pantai Indonesia belum banyak diusahakan secara intensif. Pada tahun 1988 dari kegiatan budidaya pantai laut ini, baru dihasilkan berbagai jenis ikan sebanyak 85.400 ton. Jumlah ini masih jauh dari potensi produksi yang diperkirakan sekitar 240 juta ton ikan/tahun. Dari areal rawa pantai yang layak untuk pertambakan, selama tahun 1987 baru dihasilkan udang dan ikan sebanyak 192.123 ton dan 59.680 ton. Jumlah ini masih lebih rendah dari potensi yang diperkirakan, yaitu udang 200.000 ton dan ikan 600.000 ton.

Usaha budidaya pertambakan yang telah banyak berkembang dalam 10 tahun terakhir ini adalah budidaya udang. Perkembangan ini tidak lepas dari membaiknya harga udang di pasaran internasional. Ekspor udang meningkat dengan pesat, bila pada tahun 1969 pangsa nilai ekspor udang terhadap keseluruhan hasil perikanan hanya 40,02 persen, maka pada tahun 1986 meningkat menjadi 76,15 persen (Pranadji, 1989). Sayangnya kegiatan budidaya udang ini membutuhkan modal awal yang sangat besar serta pencurahan waktu yang sangat besar, sehingga sulit jadi usaha sambilan nelayan.

Rumput Laut

Hampir seluruh pantai Indonesia potensial untuk dibudidayakan rumput laut. Seperti terlihat pada Tabel 3 rumput laut dari jenis *Eucheuma*, memungkinkan untuk dibudidayakan di seluruh wilayah pantai Indonesia. Wilayah-wilayah pantai di daerah Bali, NTB, NTT dan Timor Timur, merupakan wilayah yang sangat potensial untuk budidaya rumput laut dari jenis *Eucheuma*.

Bila dibandingkan dengan potensi yang ada, baik itu potensi alami dan potensi budidaya, tingkat produksi rumput laut Indonesia masih di bawah potensi yang tersedia. Dari ketersediaan rumput laut secara alami saja, selama tahun 1988 produksi rumput laut Indonesia baru mencapai 91,4 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan potensi budidaya, produksi selama tahun 1988 baru 5,6 persen dari potensi yang tersedia.

Rendahnya tingkat pengusahaan tersebut disebabkan belum meratanya kegiatan budidaya dan pemanfaatan rumput laut. Wilayah-wilayah di sekitar perairan Selat Malaka dan Timur Sumatera, serta di wilayah perairan Kalimantan selama tahun 1988, belum banyak mengenal rumput laut secara ekonomis. Rumput laut yang ada di wilayah-wilayah ini, secara kecil-kecilan dimanfaatkan sebagai campuran obat-obatan tradisional dan tujuan lainnya. Belum tersedianya industri yang memanfaatkan rumput laut, dan pihak-pihak yang mengolah lebih lanjut untuk kemudian diekspor, menyebabkan masyarakat belum tertarik mengembangkan tanaman ini. Selain masalah pemasaran,

Tabel 3. Keragaan pemanfaatan potensi rumput laut di beberapa perairan Indonesia, tahun 1988 (ton kering)

Lokasi perairan	Jumlah produksi	Potensi budidaya Eucheuma	% pemanfaatan potensi budidaya	Potensi alami semua rumput laut	% Pemanfaatan potensi alami
1. Barat Sumatera	602	6.750	8,9	120	501,7
2. Selatan Jawa	256	6.750	3,8	60	426,7
3. Selatan Maluku	0	16.875	0	440	0
4. Timur Sumatera	0	12.375	0	325	0
5. Utara Jawa	299	7.875	3,8	365	81,9
6. Bali, NTT	9.240	106.875	8,7	6.960	132,8
7. Selatan/Barat Kalimantan	0	5.625	0	100	0
8. Timur Kalimantan	0	5.625	0	100	0
9. Selatan Sulawesi	1.044	22.500	4,6	955	109,3
10. Utara Sulawesi	499	11.250	4,4	1.150	43,4
11. Maluku, Irija	1.651	39.375	4,2	4.300	38,4

Sumber : Nurzali Naamin dan Atmadja Hardjamulia, 1990.

hal lain yang menghambat upaya budidaya rumput laut adalah besarnya ketergantungan pada keadaan alam dan iklim yang sukar dikuasai manusia (Soegiarto *et al.*, 1977). Walaupun demikian untuk jangka panjang, rumput laut dapat dijadikan salah satu andalan usaha nelayan dengan mengeleminir berbagai kelemahan tersebut di atas.

Ikan dan Lainnya

Beberapa jenis ikan sangat prospektif untuk dikembangkan dengan cara budidaya pantai, hal itu tidak saja karena secara teknis dapat dilaksanakan tapi juga peluang pasarnya terbuka lebar. Menurut Susilowati (1991), nelayan di Perairan Riau secara

illegal mampu memasok sekitar 72.500 ekor ikan hias laut per bulannya ke Singapura. Selain itu secara legal, selama tahun 1987, Singapura mendatangkan 20 ton ikan Kerapu dari perairan Riau. Ikan Kerapu ini umumnya dikirim dalam keadaan hidup. Harga ikan Kerapu hidup di tingkat produsen, pada tahun 1988 berkisar Rp 8000 per kilogram. Jenis ikan lain yang banyak diminta dalam keadaan hidup adalah Kakap Merah.

Secara teknis kegiatan budidaya beberapa jenis ikan yang disebutkan di atas, sudah dapat dilakukan di beberapa perairan Indonesia. Secara rinci lokasi yang cocok bagi pengembangan budidaya beberapa jenis ikan dan rumput laut dapat dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat

Tabel 4. Lokasi pengembangan budidaya laut pada beberapa wilayah pantai di Indonesia

Propinsi	Kabupaten	Wilayah Pesisir	Jenis yang dibudidayakan
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta	Jakarta Utara	Kep. Seribu (P. Panggang, P. Harapan, P. Pramuka, P. Kelapa)	Ikan kerapu, beronang, lemcam, kerang hijau, rumput laut
Jawa Barat	Serang	Teluk Banten (Kec. Kasemen, Linduk, Dukuh Padek, Sawah Luhur)	Ikan Kerapu, udang windu, rumput laut, kerang hijau
	Tangerang	Teluk Ketapang (Tj. Pasir Mauk)	Ikan baronang, kerapu, udang windu.
	Subang Garut Ciamis Sukabumi	Gegara Menyan Pameungpeuk Teluk Pangadaran Ujung Genteng Pangumbahan	Kerang-kerangan Rumput laut Rumput laut Penyu
Jawa Tengah	Jepara	P. Karimun Jawa (sepanjang pantai utara Jawa Tengah)	Rumput laut, udang windu Udang Windu
Jawa Timur	Banyuwangi	Grajan	Rumput laut, ikan kakap, kerapu, bambangan
Bali		Nusa Dua	Rumput laut
Sumatera Utara	Asahan	Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, Tapanuli Tengah, Nias	Molusca, crustacea dan ikan
Riau	Kep. Riau	P. Bintan, Lingga, P. Batam, Senayang, Riau Kep. P. Dompok	Udang putih, Kerapu, Kakap
Lampung	Lampung Utara	Labuhan, Maringgai, Teladas Krui, Rumput laut	Ikan kerapu, kakap, kerang
		Lampung Selatan	Ikan kerapu, kakap, rumput laut, mutiara
Sulawesi Utara	Sangihe Talaud	Talengen	Ikan beronang, kuwe, kerapu
Sulawesi Selatan		Ujung Pandang, selayar, Barru, Pinrang	Ikan kerapu, udang windu

Sumber : Susilowati (1991)

bahwa wilayah pantai utara Jawa dan sekitar Selat Malaka, secara teknis memungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya beberapa jenis ikan, terutama ikan Kerapu.

Bila dilihat daerah rawa pantai, kegiatan budidaya ikan masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Hasil penelitian Erwidodo *et al.* (1991) pada beberapa desa pantai di kabupaten Indramayu, terungkap bahwa usaha budidaya bandeng masih dilakukan dengan pola tradisional, sehingga produktivitas hasil rendah. Produksi ikan bandeng selama satu musim pemeliharaan (5 – 6 bulan), hanya sekitar 1 – 2,5 kwintal per hektar tambak. Rendahnya produktivitas hasil tambak ini disebabkan tidak intensifnya kegiatan usaha, akibat terbatasnya modal yang dimiliki nelayan.

Usaha Lainnya

Usaha lain di luar kegiatan di atas, belum banyak berkembang. Usaha-usaha sederhana seperti pemeliharaan ternak kecil dan unggas, yang tidak banyak menuntut modal dan ketrampilan tinggi, belum banyak dilakukan nelayan walaupun potensi tenaga kerja keluarga untuk usaha ini cukup besar. Menurut Manurung *et al.* (1989), pemanfaatan tenaga kerja keluarga di desa pantai Maluku Tengah dan Tapanuli Tengah baru sekitar 24 persen.

Para nelayan di Bali yang mengusahakan ternak babi dan ayam, mendapatkan tambahan penghasilan rata-rata Rp 78.400 setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan oleh wanita dan anak-anak sebagai pekerjaan sambilan (Arga dan Antara, 1992). Pemeliharaan ternak babi yang dilakukan oleh nelayan di Maluku Tengah secara terbatas, umumnya kurang dipelihara sebagaimana mestinya dan ternak yang ada dibiarkan bebas mencari makan sendiri (Manurung *et al.*, 1989).

Peluang usaha lainnya, baik yang ada di dalam desa ataupun di luar desa, belum banyak digarap nelayan atau penduduk desa pantai. Keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan menyebabkan sulit bagi mereka untuk keluar dari usaha penangkapan ikan. Selain itu usaha-usaha di luar kegiatan penangkapan ikan juga terbatas adanya.

TANTANGAN PENGEMBANGAN

Secara umum pengembangan usaha di luar kegiatan penangkapan ikan masih menghadapi berbagai hambatan, yang dapat dikelompokkan atas:

- Hambatan yang ada dalam diri nelayan sendiri.
- Hambatan yang ada di luar diri nelayan.

Hambatan yang Ada Dalam Diri Nelayan Sendiri

Kehidupan nelayan mempunyai karakteristik yang spesifik dan sangat berbeda dengan para petani yang melakukan kegiatan budidaya. Karakteristik yang khas ini nampaknya berpengaruh terhadap pandangan dan pola perilaku mereka menghadapi kehidupan ini. Menurut Pollnac (1988) karakteristik yang tidak biasa dari mata pencahariannya (jam kerja yang tidak teratur, terpisah dari masyarakat daratan) sering mengakibatkan nelayan menjadi terasing secara sosial. Keterasingan sosial ini menyulitkan mereka mencapai pendidikan formal dan juga mempengaruhi sikapnya terhadap anggota lain dalam kelompok masyarakat.

Hasil penelitian Mubyarto *et al.* (1984) menunjukkan, akibat keterasingan di atas dan pandangan mereka terhadap hidup mereka, sulit bagi para nelayan untuk membebaskan diri dari profesi nelayan, turun temurun mereka adalah nelayan. Selanjutnya Pollnac (1988) mengulas:

"Sejarah mereka yang panjang sebagai kelas rendah yang tertekan, mungkin juga memaksa mereka untuk menerima eksploitasi sebagai suatu pandangan hidup"

Keadaan ini menyulitkan pihak-pihak luar yang ingin melakukan perbaikan kehidupan mereka.

Hal lain yang cukup menghambat adalah kebiasaan nelayan yang sudah terbiasa dengan kegiatan pengusahaan pada sumberdaya yang bebas masuk, tanpa harus memikirkan aspek-aspek yang berkaitan pemeliharaan dan lainnya, sehingga kegiatan budidaya merupakan suatu hal yang baru dan agak asing bagi mereka (Anonim, 1988).

Pandangan nelayan terhadap kehidupan yang dijalani, dan kebiasaan-kebiasaannya seperti diuraikan di atas, merupakan hambatan utama dalam upaya untuk mengembangkan alternatif pekerjaan lain, selain penangkapan ikan. Karena itu hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum masuk pada hal-hal yang bersifat teknis praktis.

Hambatan yang Ada di Luar Diri Nelayan

Pembangunan desa pantai selama ini, lebih banyak hanya dilihat sebagai pengembangan kehidupan nelayan. Akibatnya tanggung jawab pengembangannya hanya dipikul oleh Departemen

Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan. Keadaan ini mempersulit terlaksananya suatu pengembangan yang terpadu. Dari beberapa kasus yang ditemui penulis di beberapa desa pantai (Tapanuli Tengah, Timor Timur), terlihat bahwa sulit sekali melaksanakan suatu program yang terpadu, karena rasa tanggung jawab pembinaan yang rendah dari instansi non pertanian. Kasus Opsusdu Maduma di Tapanuli Tengah, khususnya untuk pengembangan rumput laut, dan PKT di kabupaten Ambeno (Tim-tim) menunjukkan gejala ini. Pada kedua proyek di atas, saat penelitian dilakukan hanya Dinas Perikanan yang masih melakukan pembinaan, sedangkan instansi lain tidak terlibat lagi, walaupun kedua program tersebut disebut-sebut sebagai proyek yang terpadu.

Hal-hal teknis yang masih merupakan masalah dalam pengembangan usaha di luar kegiatan penangkapan ikan di desa pantai antara lain:

- Belum tersedianya suatu peta wilayah pesisir yang akurat, sehingga sulit untuk melihat secara lebih rinci wilayah mana yang benar-benar bisa untuk pengembangan budidaya pantai.
- Pencemaran sungai yang cukup tinggi pada beberapa lokasi, terutama yang sungainya bermuara ke laut, menyulitkan para nelayan dalam melakukan kegiatan budidaya.
- Masih mahalnnya harga bibit ikan dan pakan yang baik. Selama ini pengadaan benih bagi usaha budidaya ikan diperoleh dari hasil penangkapan di laut dengan menggunakan jaring insang. Akibatnya harga per satuan benih jadi mahal. Usaha pengadaan benih oleh beberapa Balai Budidaya Laut, belum banyak menolong dalam pengadaan benih.
- Usaha budidaya pantai, pada tahap awalnya butuh modal yang cukup besar. Nelayan sering mengalami kesulitan dalam hal ini.
- Kegiatan pemasaran hasil, terutama untuk hasil budidaya rumput laut, masih menemui beberapa kendala.

PENUTUP

Pengembangan usaha di luar kegiatan penangkapan ikan, "sudah harus" menjadi pemikiran yang serius bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan di desa pantai. Hal ini tidak saja karena usaha penangkapan ikan sudah agak sulit untuk tetap diandalkan sebagai usaha utama, terutama pada daerah-daerah yang sudah kelebihan

tangkap, tetapi juga karena kegiatan ini bila berhasil, mempunyai dampak psikologis yang sangat besar bagi para nelayan. Perasaan keterasingan dan hal-hal negatif lainnya dapat diarahkan pada pola-pola sikap yang positif.

Untuk dapat dilakukannya suatu pola pengembangan yang baik, upaya ini perlu didahului dengan mengeliminir hambatan-hambatan yang ada pada diri nelayan. Hal yang berkaitan dengan pendidikan dan penyuluhan, merupakan langkah utama yang diperlukan untuk "membuka mata" mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain selain kegiatan penangkapan ikan.

Pengembangan lebih lanjut program ini sangat memerlukan suatu pendekatan yang terpadu, karena itu pendekatan dalam pengembangannya adalah sebagai pengembangan desa pantai. Melalui pendekatan pengembangan wilayah ini, diharapkan peranan berbagai sektor, terutama dalam hal pembinaannya, dapat terus berjalan sebagai kegiatan rutin sektoral.

Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis, seperti pemetaan lokasi, pengadaan bibit dan pakan serta penanggulangan pencemaran beberapa perairan, perlu penanganan yang seksama dan terencana bersamaan dengan pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusianya. Sehingga pada saat para nelayan sudah ada keinginan untuk mencoba atau memulai, semuanya sudah siap untuk mendukung pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1988. Upaya Pengembangan Budidaya Laut. Raker Dirjen Perikanan Tahun 1988. Dirjen Perikanan, Jakarta.
- Anonim, 1990. Definisi dan Kriteria Desa yang Memerlukan Perhatian Khusus dalam Pembangunan. Sek. Ditjen. Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Anonim, 1993. Hasil Rumusan Kelompok I Integrated Marine Fisheries Resources Development and Management, dalam Prosiding Forum III Perikanan, Sukabumi, 22–25 Juni 1992. Puslitbang Perikanan dan USAID/FRDP. Jakarta.
- Cholik, F. dan S. Putro, 1990. Dukungan Penelitian dan IPTEK Terhadap Perikanan Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Forum Perikanan I, Sukabumi, 19–20 Juli 1990, Puslitbang Perikanan dan USAID/FRDP, Jakarta.
- Dwiponggo, A. 1991. Pemanfaatan dan Pengelolaan Optimal Perikanan Laut Dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahap II. Prosiding Forum II Perikanan. Sukabumi, 18–21 Juni 1991. Puslitbang Perikanan dan USAID/FRDP. Jakarta.
- Hermanto *et al.*, 1985. Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Daerah Pantai. Puslit Agro Ekonomi, Bogor.

- Manurung, V.T., A. Zulham, E. Jamal, 1989. Penelitian Potensi dan Pengembangan Desa Pantai Maluku dan Sumatera Utara. Laporan Teknis. Puslit Agro Ekonomi. Bogor.
- Mintoro, Abunawan, 1993. Keragaan Beberapa Pola Usaha Penangkapan Ikan di Laut oleh Rakyat di Indonesia. Dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 10 No.2 dan Volume 11 No.1, Juli 1993. Puslit Sosek Pertanian, Bogor.
- Mubyarto, L. Soetrisno, M. Dove, 1984. Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Yayasan Agro Ekonomika, CV. Rajawali. Jakarta.
- Naamin, Nurzali dan Atmadja Hardjamulia, 1990. Potensi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Forum Perikanan I, Sukabumi, 19 – 20 Juli 1990, Puslitbangkan-USAID/FRDP. Jakarta.
- Pasandaran, E., V.T. Manurung, A. Zulham, Y. Yusdja. 1990. Alternatif Kebijakan Pembangunan Perikanan Jangka Panjang. Disampaikan pada Forum Perikanan I Sukabumi, 19 – 20 Juli 1990. Puslitbang Perikanan dan USAID/FRDP. Jakarta.
- Panayotou, T. 1987. Kondisi Ekonomi dan Prospek Nelayan Kecil di Muangthai, dalam "Ekonomi Perikanan Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis". Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia. Jakarta.
- Pollnac, R.B. 1988. Karakter Sosial dan Budaya Dalam Pengembangan Perikanan Skala Kecil, Dalam buku "Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan" (Publikasi Bank Dunia). UI-Press. Jakarta.
- Pranadji, T. 1989. Sistem Pemasaran Udang Windu Tambak Rakyat di Jawa Timur. Forum Penelitian Agro Ekonomi, FAE, Vol.7 No.1. Juli 1989. Puslit Agro Ekonomi. Bogor.
- Simatupang, P., M.H. Sawit dan V.T. Manurung, 1990. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan dan Kaitannya dengan Teknologi Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah. Dalam Prosiding "Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Ekspor Non-Migas". Puslit Agro Ekonomi, Balitbang Deptan. Bogor.
- Smith, I.R., 1987. Peningkatan Pendapatan Perikanan pada Sumberdaya yang Sudah Lebih Lengkap, Dalam "Ekonomi Perikanan Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis". Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia. Jakarta.
- Soegiarto, A. *et al.* 1977. Rumput Laut (ALGAE), Manfaat, Potensi dan Usaha Budidaya. Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta.
- Susilowati, T. 1991. Prospek dan Kendala Budidaya Laut di Indonesia. Prosiding Temu Karya Ilmiah Perikanan Rakyat. Jakarta, 18 – 19 Desember 1989. Puslitbang Perikanan. Jakarta. Hal.708-715.